

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Era reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah merupakan satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tahun tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintah yang baik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang salah satu agendanya adalah implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Sehingga setiap Negara diwajibkan untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, Laporan Keuangan harus dibuat Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Temanggung dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019(Lembar daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, secara sistematis terdiri atas :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
- Bab III : Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan
- Bab IV : Penutup

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Untuk Dinas Sosial tidak terdapat pendapatan daerah.

2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari :

2.1. Belanja Tidak Langsung

2.2. Belanja Langsung

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung untuk Dinas Sosial meliputi :

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Hibah

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

2.1.4 Belanja Bantuan Keuangan

2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan Realisasi TA 2019 sebesar Rp 3.525.547.350,- atau 93,51 % dari anggaran Rp 3.770.152.766,- dan 98,66 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp 3.089.513.397,- sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan	2.281.952.766	2.189.873.490	2.171.238.797
Tambahan Penghasilan PNS	1.488.200.000	1.335.673.860	918.274.600
	3.770.152.766	3.525.547.350	3.089.513.397

2.1.2 Belanja Hibah

Untuk Tahun anggaran 2019, di Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Urusan Sosial yaitu Bantuan Sosial bagi Panti di APBD Penetapan dan Bantuan Hibah Rehab Gedung PEPABRI Kecamatan Kranggan di APBD Perubahan 2019

1. Belanja Hibah bagi panti sebagai berikut :

Belanja Sosial	2018		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PA. Darul Falah Desa Rejosari Kec. Pringsurat	25.000.000	25.000.000	
PA. Darul Hadlonah Putri Logoksari Temanggung	25.000.000	25.000.000	
PA. Darul Hadlonah Putra Campursari Bulu	25.000.000	25.000.000	
PAYja Muhammadiyah Putra Kertosari Temanggung	25.000.000	25.000.000	
	100.000.000	100.000.000	

Realisasi Rp 100.000.000,- atau 100 % dari anggaran Rp 100.000.000,-
Bantuan sosial untuk sarana dan prasarana bagi 4 Panti di Kabupaten Temanggung.

2. Belanja Hibah Rehab Gedung PEPABRI Kecamatan Kranggan
 Realisasi Rp 25.000.000,- atau 100 % dari anggaran Rp 25.000.000,- dengan tahapan pencairan 2 kali di bulan Desember 2019 untuk rehab gedung Pepabri Kecamatan Kranggan.

2.1.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Sosial Urusan sosial dengan realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2018, sebagai berikut :

Belanja Sosial	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Sosial untuk permakanan anak panti asuhan	1.015.612.500	1.015.612.500	947.905.000
Bantuan Pengembangan KUBE	50.000.000	50.000.000	-
Bantuan Sosial penyandang cacat berat dan ganda	-	-	347.400.000
Jaminan Sosial disabilitas cacat berat dan ganda	360.000.000	354.600.000	-
Jaminan Sosial LU Non Potensial	720.000.000	702.000.000	716.400.000
Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)	150.000.000	150.000.000	180.000.000
Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	174.000.000	174.000.000	180.000.000
Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Terlantar (LUT) Potensial	150.000.000	150.000.000	180.000.000
Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10.400.000.000	10.162.500.000	5.137.500.000
Bantuan Stimulan UEP bagi korban tindak kekerasan pekerja migran (KTK-PM)	-	-	15.000.000
Santunan duka cita	3.000.000.000	3.000.000.000	-
	16.049.612.500	15.788.712.500	7.734.205.000

Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dengan realisasi Rp 15.788.712.500,- atau 98,37 % dari anggaran Rp 16.049.612.500,- dan 99,31 % dari realisasi TA 2018 sebesar 7.734.205.000,-

Adapun realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 terdiri dari :

1. Belanja bantuan organisasi kemasyarakatan
 - Bantuan Sosial untuk permakanan anak panti asuhan
 Realisasi Rp 1.015.612.500,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp 1.015.612.500,-
 Penerima bantuan 371 anak @ Rp 7.500 per hari selama satu tahun,- di 8 Panti Asuhan,
 di Kabupaten Temanggung.

2. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
 - Bantuan Sosial Pengembangan KUBE
Realisasi Rp 50.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 50.000.000 ,-
Penerima bantuan 5 orang di 3 Desa 1 Kecamatan @ Rp 10.000.000,-
pencairan dilaksanakan 1 kali di bulan September 2019
3. Belanja bantuan sosial kepada masyarakat terdiri dari :
 1. Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat, dan Ganda
Realisasi Rp 360.000.000 ,- atau 96,50 % dari anggaran Rp 354.600.000 ,-
Penerima bantuan 197 orang @ Rp 1.800.000,- dari calon penerima 200 orang.
Pencairan dilaksanakan 2 kali yaitu di bulan Juli dan Desember 2019.
Tercapat 2 orang tidak pencairan karena meninggal dunia, dan 1 orang kembali ke Kasda sudah menerima bantuan lain (JSLU)
 2. Jaminan Sosial Lanjut Usia Non Potensial
Realisasi Rp 702.000.000 ,- atau 97,50 % dari anggaran sebesar Rp 720.000.000 ,-
dari pencairan sebesar Rp 702.000.000 ,- untuk penerima bantuan 390 orang dari calon penerima 400 orang.
Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Agustus dan bulan Desember 2019.
Untuk pencairan tahap ke 1 disetorkan ke kasda sebesar Rp 25.400.000,- dari 14 penerima bantuan ,per orang menerima sebesar Rp 1.800.000 ,-
Disetorkan ke kasda karena penerima bantuan meninggal dunia dan mendapatkan santunan kematian.
Dan di anggaran perubahan tidak dicairkan 10 orang karena meninggal dunia.
 3. Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)
Realisasi Rp 150.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 150.000.000 ,-
Penerima bantuan di 10 desa dari 6 Kecamatan
Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Mei dan Desember 2019
Jumlah penerima 100 orang dari 100 calon penerima, per orang Rp 1.500.000 ,-
300
 4. Bantuan stimulan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
Realisasi Rp 174.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 174.000.000 ,-
Jumlah Penerima 116 orang dari 116 calon penerima, per orang Rp 1.500.000 ,-
Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Mei dan Desember 2019
di 11 desa dari 9 Kecamatan
 5. Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia terlantar (LUT) Potensial
Realisasi Rp 150.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 150.000.000 ,-
Jumlah penerima 100 orang dari 100 orang calon penerima
Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Mei dan Desember 2019
per orang Rp 1.500.000,- di 10 desa dari 7 Kecamatan
 6. Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan
Realisasi Rp 30.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 30.000.000 ,-
Penerima bantuan 20 orang di Desa Kemiriombo Kec. Gemawang @ Rp 1.500.000,-
pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Mei dan Desember 2019

- 7. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 Realisasi Rp 10.400.000.000,- atau 97,72 % dari anggaran Rp 10.162.500.000,-
 Penerima bantuan 813 orang dari calon penerima 832, 19 orang penerima tidak dicairkan karena menerima bantuan dari sumber lain, meninggal dunia, tidak siap swadaya dan terbangun mandiri
 Lokasi di 112 desa dari 20 Kecamatan @ Rp 12.500.000,-
 Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Juli dan Desember 2019
 Disetorkan kasda /pemindahbukuan sebesar Rp 25.000.000,- untuk pencairan di penetapan dan pencairan di perubahan masing-masing 1 orang, dikarenakan tanah bukan milik sendiri dan tidak siap swadaya.
- 8. Santunan Kematian
 Realisasi Rp 3.000.000.000,- atau 100 % dari anggaran Rp 3.000.000.000,-
 Penerima bantuan 2.000 orang dari calon penerima 2.000 orang
 Lokasi di 266 desa dan 23 kelurahan dari 20 Kecamatan @ Rp 1.500.000,-

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang terdapat pada 8 Program dari 45 kegiatan dengan realisasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut :

NO	Uraian	2019		2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	878.237.000	845.248.900	825.542.300
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.666.513.400	2.436.195.157	2.067.110.170
3.	Belanja Modal	1.687.569.500	1.492.530.702	101.075.000
		5.232.319.900	4.773.974.759	2.993.727.470

Untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 realisasinya Rp 4.773.974.759,- atau 91,24 % dari anggaran sebesar Rp 5.232.319.900,- dan 90,37% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp 2.993.727.470,-

2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 Rp 845.248.900,- atau 96,24 % dari anggaran sebesar Rp 878,237.000,- dan 91,96 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp 825.542.300,-

Belanja Pegawai	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Honorarium PNS	91.257.000	69.490.000	108.481.000
Honorarium Non PNS	786.980.000	775.758.900	717.061.300
	878.237.000	845.248.900	825.542.300

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasi Tahun Anggaran 2019 Rp 2.436.195.157,- atau 91,36 % dari anggaran sebesar Rp 2.666.513.000,- dan 88,95 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp 2.067.110.170,-

Belanja Barang dan Jasa	2019		2018
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
Belanja bahan pakai habis	241.333.100	227.487.605	161.435.900
Belanja bahan material	69.083.800	67.444.785	43.957.000
Belanja jasa kantor	149.966.000	118.028.225	110.419.586
Belanja premi asuransi	36.498.000	22.075.940	18.875.340
Belanja perawatan kendaraan bermotor	97.290.000	91.300.275	104.800.887
Belanja cetak dan penggandaan	101.238.800	99.001.200	66.551.600
Belanja sewa rumah/gedung/gudanga/parkir	450.480.000	416.390.000	149.910.000
Belanja sewa mobilitas darat	74.393.000	63.180.000	48.425.000
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	11.550.000	11.550.000	20.715.000
Belanja makanan dan minuman	308.795.500	254.603.000	348.528.500
Belanja pakaian kerja	600.000	600.000	2.000.000
Belanja pakaian dinas & atribut	-	-	8.500.000
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.250.000	43.250.000	27.520.000
Belanja perjalanan dinas	621.427.600	580.728.027	554.781.357
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek	323.100.000	312.650.000	312.630.000
Belanja barang yang akan diserahkan kpd masy.	70.007.600	62.035.350	85.060.000
Belanja kepesertaan	-	-	-
Belanja jasa konsultasi	67.500.000	65.870.750	-
	2.666.513.400	2.436.195.157	2.067.110.170

2.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Rp 1.492.530.702 ,- atau 88,44 % dari anggaran sebesar Rp 1.687.569.500 ,-

Belanja Modal	2018	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Tanah	-	-
b. Peralatan dan Mesin	187.569.500	184.575.700
c. Gedung dan Bangunan	1.500.000.000	1.307.955.002
d. Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Aset lainnya	-	-
	1.687.569.500	1.492.530.702

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. ASET LANCAR

1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	42.250	49.417
Jumlah Kas dan Setara Kas	42.250	49.417

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 42.250 ,- adalah merupakan pajak yang belum disetor di bulan Desember 2019

1.2 Persediaan

Persediaan		2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Alat listrik dan elektronik	43.900	1.256.000
2.	Alat Tulis Kantor	3.830.000	1.605.900
3.	Perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000	213.000
4.	Belanja perlengkapan kantor lainnya	-	-
5.	Belanja cetak	3.492.700	1.442.400
6.	Peralatan kebersihan dan bhn pembersih	576.200	1.786.500
7.	Belanja alat penerangan dan kelengkapannya	195.800	-
8.	Bahan obat - obatan	-	35.000
9.	Peralatan kedokteran umum	-	-
10.	Bahan lainnya	84.000	1.100.000
11.	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	23.685.000	1.188.000
12.	Bahan/bibit tanaman	-	200.000
13.	Persediaan suku cadang alat kedokteran	-	1.013.800
Jumlah persediaan		32.069.600	9.840.600

Saldo persediaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 32.069.600,- yang merupakan barang yang mempunyai sifat pakai habis.

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Untuk Dinas Sosial tidak terdapat Investasi Jangka Panjang karena tidak ada aset yang untuk memperoleh nilai ekonomi.

3. ASET TETAP

Posisi jenis dan nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.164.062.785,00,- dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.369.036.796,78 yang tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap		2019 (Rp)	2018 (Rp)
a.	Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00
b.	Peralatan dan Mesin	3.683.759.883,00	3.490.523.183,00
	<i>Penyusutan</i>	-	(2.474.878.387,46)
c.	Gedung dan Bangunan	3.957.423.115,00	2.649.468.113,00
	<i>Penyusutan</i>	-	(1.738.304.900,76)
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.543.887,00	215.543.887,00
	<i>Penyusutan</i>	-	(80.650.998,00)
e.	Aset tetap lainnya	5.345.900,00	5.345.900,00
f.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Jumlah aset		9.164.062.785,00	3.369.036.796,78

Mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap selama tahun 2019				
Aktiva Tetap	Saldo awal 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan/penyusutan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	1.301.990.000,00	-	-	1.301.990.000,00
Peralatan dan Mesin	3.490.523.183,00	193.236.700,00	-	3.683.759.883,00
Gedung dan Bangunan	2.849.468.113,00	1.307.955.002,00	-	3.957.423.115,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.543.887,00	-	-	215.543.887,00
Aset tetap lainnya	5.345.900,00	-	-	5.345.900,00
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
	7.662.871.083,00	1.501.191.702,00	-	9.164.062.785,00

Mutasi aset tetap sebesar Rp 1.501.191.702,00 yang berasal dari penambahan aset Rp 1.492.530.702,00 dan mutasi aset dari Setda sebesar Rpp 8.661.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2019 sebesar Rp 1.301.990.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a.	Tanah Makam Pahlawan	129.150.000
b.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000
c.	Tanah Bangunan Pelatihan (Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000
d.	Tanah Bangunan Pelatihan (Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000
	Jumlah	1.301.990.000

Tanah :

Saldo awal 2018	1.301.990.000
Mutasi	-
Saldo akhir 2019	<u>1.301.990.000</u>

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2019 adalah didasarkan pada neraca awal dan terdapat penambahan ataupun pengurangan/penyusutan. Adapun nilai dari peralatan dan mesin sebesar Rp 3.683.759.883,00 dengan perincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin		
Saldo Awal 2018		3.490.523.183,00
Penambahan 2019		
Pengadaan 2018	184.370.700,00	
mutasi dari Setda	<u>8.661.000,00</u>	<u>193.236.700,00</u>
Jumlah		3.683.759.883,00
Pengurangan :		
Penyusutan :	-	
dikeluarkan ke bahan pakai habis	-	
jumlah		<u>3.683.759.883,00</u>

Untuk Aset peralatan dan mesin tahun 2019 terdapat penambahan sebesar Rp 8.661.000,00 yang berasal dari hibah Setda berupa peralatan kantor yaitu 2 buah meja kerja non struktural dan 2 buah kursi pejabat eselon 4

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan terdapat perubahan yaitu adanya penambahan dan pengurangan / penyusutan per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- Saldo awal 2018	2.649.468.113,00
Penambahan 2019	<u>1.307.955.002,00</u>
Jumlah	3.957.423.115,00
Penyusutan	<u>-</u>
Jumlah per 31 Desember 2019	3.957.423.115,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset jalan, jaringan dan irigasi terdapat perubahan yaitu adanya penambahan dan pengurangan / penyusutan per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- Saldo awal 2018	215.543.887,00
Penambahan 2018	<u>-</u>
Jumlah	215.543.887,00
Penyusutan	<u>-</u>
Jumlah	215.543.887,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar Rp 5.345.900,- yaitu merupakan buku - buku perpustakaan, terdapat perubahan penambahan sampai dengan per 31 Desember 2018.

- Saldo awal	5.345.900
Penambahan 2019	<u>-</u>
Saldo akhir	5.345.900
Pengurangan :	
reklas ke KIB B	-
reklas ke ekstrakomtabel	<u>-</u>
Jumlah	5.345.900

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Untuk konstruksi dalam pengerjaan Dinas Sosial tidak terdapat bangunan dalam pengerjaan atau nihil.

4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud dan aset rusak, terdapat perubahan yaitu adanya penambahan berikut :

Saldo awal 2018	12.500.000
terdiri dari :	
- Aset tak berwujud	10.000.000
(Penyusutan)	-
- Aset rusak	2.500.000
(Penyusutan)	-
Penambahan 2019	<u>-</u>
Jumlah per 31 Desember 2019	12.500.000

BARANG BARANG EKSTRAKOMTABLE

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomtabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomtabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomtabel meliputi :

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai batas materialitas Rp 200.000,-
- b. Aset Tetap Lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp 200.000,-

Saldo barang ekstrakomtabel per 31 Desember 2019 sebesar Rp 53.660.205,-

Saldo awal	52.419.505
Penambahan 2019	<u>1.240.700</u>
Saldo per 31 Desember 2019	53.660.205

5. KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp 148.730.464,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa serta utang pajak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Terdapat utang pajak untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp 42.250,- terdiri dari :

- PPh pasal 21	Rp 9.750
- Pajak daerah	<u>Rp 32.500</u>
Jumlah	Rp 42.250

2. Utang Belanja Pegawai dan Belanja barang dan Jasa

Merupakan utang belanja bulan Desember tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja TPP	Rp 91.524.560	
2. Belanja honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	Rp 47.450.000	
3. Upah Tenaga Kerja	Rp 2.880.000	
4. Belanja Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 4.982.743	
4. Belanja iuran BPJS	<u>Rp 1.850.911</u>	
Jumlah	Rp 148.688.214	Rp 148.730.464

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Belanja TPP bulan Desember 2019 Rp 91.524.560

2. Belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan upah tenaga kerja bulan Desember 2019 :

- Petugas kebersihan	Rp 3.000.000
1. Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp 1.850.000
2. Kegiatan Operasional rumah perlindungan sosial	Rp 12.600.000
3. Kegiatan pemberdayaan PSKS dan keluarga	<u>Rp 30.000.000</u>
Jumlah	Rp 47.450.000

3. Upah Upah tenaga kerja pemeliharaa TMP Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Rp	2.880.000
4. Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bl Desember 2019:		
- Rekening Telepon	Rp	118.555
- Rekening Air	Rp	766.200
- Rekening Listrik	Rp	1.534.660
- Speedy/Internet	Rp	2.563.328
	Rp	<u>4.982.743</u>
5. Belanja iuran BPJS :		
- BPJS Kesehatan		
Petugas kebersihan	Rp	100.922
Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	55.500
Kegiatan Operasional rumah perlindungan Sosial	Rp	403.688
Kegiatan Pemberdayaan PSKS dan keluarga	Rp	<u>1.009.220</u>
Jumlah	Rp	1.569.330
- BPJS Ketenagakerjaan		
Petugas kebersihan	Rp	18.166
Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	9.083
Kegiatan Operasional rumah perlindungan Sosial	Rp	72.666
Kegiatan pemberdayaan PSKS dan keluarga	Rp	<u>181.666</u>
Jumlah	Rp	281.581
Jumlah	Rp	<u>1.850.911</u>

6. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang terdapat pada SKPD yaitu sebesar Rp 1.384.573.088

D. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan kegiatan Adapun laporan operasional disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan LO

Pendapatan LO pada Dinas Sosial sebesar Rp 0,-

2. Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintahan selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

	Beban LO	2019
Beban Pegawai		4.394.425.410,00
Beban Barang dan Jasa		2.415.837.678,00
Beban penyusutan dan amortisasi		
Jumlah		<u>6.810.263.088,00</u>

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 113.346.933,00,- berasal dari nilai ekuitas akhir tahun anggaran 2018. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit sebesar Rp 6.810.263.088,00,-, yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp 8.661.000,00,-, dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan sehingga sebesar Rp 8.299.522.109,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.384.573.088,00

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60)

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdomisili di Jalan Pahlawan No 4 A Temanggung

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung-jawaban keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan Dinas Sosial berupa : LRA Belanja, Rekap SP2D dan SPJ, Laporan Operasional (LO), Neraca dan Kertas Kerja Ekuitas (LPE) ,Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang berakhir 31 Desember 2019, memuat informasi-informasi penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah .

Temanggung, Desember 2019


DIA KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris
Dra ETTY WAHYUNINGSIH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19630310 198910 2 001